

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi membawa perubahan besar bagi seluruh sektor baik bidang pemerintahan, industri, dan perekonomian di Indonesia. Pada sektor pemerintahan Indonesia dulu menggunakan sentralisasi dan sekarang berubah menjadi desentralisasi, yang mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah percantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah. Pemerintah daerah berhak mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membahas tentang sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan proses penting dalam pembangunan yang memerlukan perencanaan dan penganggaran yang memadai, untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara tepat sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, diperlukan pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi sebagai dasar penilaian bagi fungsi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan anggaran tahunan (Arif & Firmansyah, 2024). Berdasarkan pendapat tersebut, pemerintah memberikan acuan pelaksanaan dan pedomanan bagi instansi pusat dan daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang tata kelola data, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pemerintah pusat dan daerah wajib menyajikan laporan keuangan tiap periode. Pentingnya laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas suatu entitas. Laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam menilai penggunaan anggaran dan pengelolaan

keuangan daerah. Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Sistem informasi yang efektif memudahkan dalam pengumpulan data yang tepat waktu dan pemrosesan informasi yang efisien, sehingga berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan (Setiawan, 2020).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya memperoleh penilaian berupa opini audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Salah satu tugas dari Badan Pemeriksanaan Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara (pusat dan daerah). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, (Berita et al., 2023) Opini audit ada 5 jenis, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – *Unqualified Opinion*
2. Opini Wajar dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) – *Modified Unqualified Opinion*
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – *Qualified Opinion* ,
4. Opini Tidak Wajar (TW) – *Adverse Opinion*.
5. Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) – *Disclamer Opinion*.

Opini audit tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) disajikan secara wajar atau tidak wajar selama periode yang telah ditentukan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masih terdapat permasalahan serta temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya opini audit, pemerintah seharusnya dapat menilai laporan keuanga layak atau tidak untuk memperoleh opini yang di berikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta melakukan pengecekan bukti data terkait informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai atau belum, agar dapat mengurangi permasalahan terutama terkait temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat dari gambar 1.1.

Gambar 1. 1

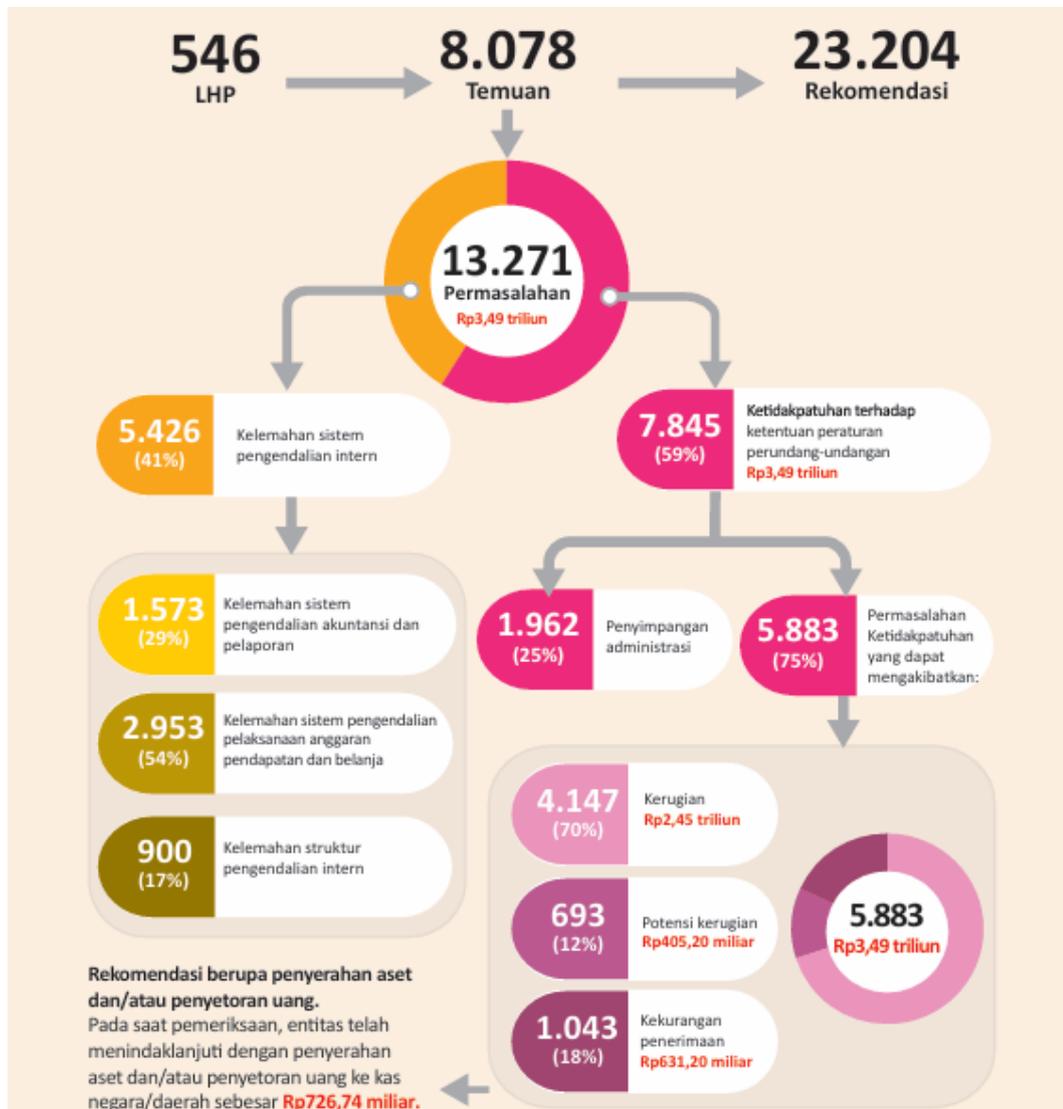
Perkembangan Opini LKPD 2019-2023.



Sumber: www.bpk.id – IHPS I Tahun 2024

Gambar tersebut menunjukkan opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada tahun 2023. Dengan ini laporan keuangan yang disajikan semakin membaik. Namun, masih terdapat temuan, permasalahan, dan rekomendasi pada LHP LKPD tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1. 2
Temuan pada LHP LKPD Tahun 2023



Sumber: www.bpk.id – IHPS I Tahun 2024

Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, yang disebabkan banyaknya temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13.271 permasalahan yaitu berupa ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.845 permasalahan sebesar Rp3,49 triliun, penyimpangan administrasi sebanyak 1.962 (tidak berdampak pada

finansial) dan kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 5.426 (BPK RI, 2024).

Masalah tersebut menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik berupa: relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dapat dibandingkan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) membantu pemerintah dalam memudahkan pengelolaan, mengidentifikasi, dan evaluasi data terkait informasi keuangan pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Dewi et al., 2023).

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik itu eksternal maupun internal tidak hanya penerapan sistem informasi pemerintah daerah saja, tetapi kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pengendalian internal ikut berperan penting. Dengan adanya hal tersebut sangat membantu pemerintah untuk memenuhi kualitas pelaporan keuangan yang disajikan.

Peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dapat memahami serta menerapkan standar akuntansi yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (Hidayat & Nuraini, 2021). kompetensi sumber daya manusia menurut UU No.13 Tahun 2013 tentang pengetahuan, keterampilan dan perilaku kerja yang memenuhi standar. Kompetensi merupakan sifat dasar bagi seseorang untuk bekerja dibidangnya. Sebagaimana diatur dalam PERKA BKN No.7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil menyatakan “ kompetensi adalah sikap dan kemampuan kerja sesuai

dengan tugas dan fungsi jabatan yang memiliki karakteristik yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Fakhri et al., 2021).

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Organisasi yang memiliki komitmen tinggi cenderung menerapkan strategi terbaik dalam pengelolaan keuangan, yang akan tercermin dalam kualitas laporan keuangannya (Susanti, 2022). Komitmen organisasi yang tinggi menunjukkan adanya keterikatan pegawai pada instansinya, sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan dan kualitas laporan keuangan secara spesifik. Oleh sebab itu, semakin dekat pegawai dengan organisasinya, maka semakin efektif laporan keuangan yang dihasilkan (Agrayi Afifa Putri et al., 2024). Menurut (Meyer dan Allen, 1991) menyatakan bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu: komitmen afektif (keterikatan emosional), komitmen kontinue (pertimbangan biaya meninggalkan organisasi), dan komitmen normatif (tekanan sosial untuk tetap bersama organisasi).

Pengendalian Internal efektif untuk mendeteksi kendala, mengevaluasi laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam penyusunan laporan keuangan (Wibowo, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian dalam menjaga integritas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa LKPD harus dilakukan bersamaan dengan SPIP karena tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tantangan pemerintah daerah dalam implementasinya berupa kendala sumber daya, kurangnya pelatihan, dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai sebagai penghambat kualitas laporan keuangan (Prasetyo, 2022). Bahkan masih terdapat hambatan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Peraturan Mementrian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam

pengembangan perangkat lunak. Terdapat permasalahan, seperti error sistem, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, serta salah input data disebabkan banyak menu yang harus diisi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Selain itu terdapat keterlambatan dalam pergeseran anggaran, hambatan pada sistem penggajian, serta berbagai kendala lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas. Hambatan ini berpengaruh terhadap pembuaatan dokumen penting seperti Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Nasution, 2021).

Tabel 1. 1
Pendidikan Pegawai Akuntansi dan Pelaporan

No	Nama	Pendidikan	Umur
1.	Hj. Meiria Suhatri, SE, ME	Sarjana Ekonomi	56
2.	Nuraini Dewi Erlita, SE	Sarjana Ekonomi	56
3.	Rian Purnama, S.STP	IPDN	30
4.	Mohd. Hapiz, SE	STAN	39
5.	Teddy Pribadi, SE, ME	Sarjana Ekonomi	54
6.	Rika Mardiaty, SE	Sarjana Ekonomi	54
7.	Herlinda, SH	Sarjana Hukum	52
8.	M. Jamel, SH	Sarjana Hukum	58
9.	Nadhia Rehima.S.Spsi, MM	Sarjana Psikologi	46
10.	Septi Linda Rahayu, SE	Sarjana Ekonomi	47
11.	Angga Pratama, SE,Ak, MM	Sarjana Ekonomi	39
12.	Tumarni, S.KOM, Ms.Ak	Sarjana Komputer	45
13.	Julasman, S.Pd.I	Sarjana Pendidikan Islam	50
14.	Makhbub Junaidi, ST	Sarjana Teknik	43
15.	Maya Rofikasari Widodo, SE, MM	Sarjana ekonomi	46
16.	As'ad, A.Md	Ahli Madya	52
17.	Muhammad Fajar, S.STP	IPDN	32

18.	Fevtriansyah, S.STP	IPDN	32
19.	Lia Febrianti, A.Md	Ahli Madya	38
20.	Debby Rahmadona	Sedang Kuliah	29
21.	Dwi Cyntia Mershel S.H	Sarjana Hukum	27
22.	Diah Widya Lestari S.Pd	Sarjana Pendidikan	31
23.	Resti Ruli Yanti	Sarjana Ekonomi	28
24.	Ratumas Nurhasanah	Sarjana Ekonomi	29
25.	Nancy Oscar Fonda	Sarjana Ekonomi	32
26.	Feri	Sarjana Ekonomi	28

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah Provinsi Jambi terdapat 12 orang dengan pendidikan terakhir sebagai sarjana ekonomi, 3 orang sarjana sains terapan pemerintah, 3 orang sarjana hukum, 2 orang sarjana pendidikan, 2 orang ahli madya, 1 orang sarjana kompuer, 1 orang sarjana psikologi, 1 orang sarjana teknik, dan 1 orang sedang kuliah. Pada bidang akuntansi dan pelaporan yang mengikuti pelatihan yaitu kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan kepala sub bidang akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 3 sub bidang yaitu: sub bidang aklap 1, sub bidang aklap 2, dan sub bidang aklap 3. Pegawai bidang akuntansi lainnya jarang mengikuti pelatihan sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan dikarenakan menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah yang setiap tahunnya mengalami pembaharuan pada sistem. Serta bahkan ada 1 orang pegawai yang berumur dan hampir pensiun tahun ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah (BPKPD) Provinsi Jambi adalah suatu instansi yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah serta menyajikan dan mengelolah laporan keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu. Provinsi Jambi menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2021 dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Kebijakan pemerintah berkontribusi dalam implementasi sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan

daerah (Setiawan, 2020). Dengan memahami pengaruh faktor- faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. penelitian ini juga bertujuan memberikan saran yang bermanfaat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Tabel 1. 2

Opini BPK atas LKPD Provinsi Jambi 2015-2023

Entitas	Opini								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Hasil pemeriksaan BPK berfungsi untuk menguji bukti-bukti yang sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko, termasuk risiko kecurangan. Namun, masih menemukan permasalahan terkait LHP 2021 Provinsi Jambi seperti:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam mengalokasikan Vaksin Pfizer.
2. Pemerintah Provinsi Jambi belum optimal dalam memfasilitasi Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) untuk memperoleh kerja sama dengan induk.
3. Terdapat indikasi ketidakwajaran harga sebesar Rp312,86 juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp759,06 juta pada pekerja Pembangunan Gedung Super VIP RSUD Raden Mattaher.
4. Kegiatan pemilahan sampah dalam rangka pendaur ulang, pemanfaatan kembali, dan pengelolaan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan sampah rumah tangga (SRT). (BPK RI Perwakilan Jambi, 2022).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tetapi, ditemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga harus ditindak lanjuti seperti:

1. Terdapat 14.271 unit kendaraan angkutan umum yang memperoleh tarif dan insentif pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan di Tahun 2022.
2. Pemerintah Provinsi Jambi belum memperoleh *participating interest* 10% pada wilayah kerja *south* Jambi B, wilayah kerja *south* Betung, wilayah kerja Tungal dan wilayah kerja Jabung.
3. Pelaksanaan belanja modal belum sesuai ketentuan.
4. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp884,69 juta, ketidaksesuaian spesifik teknis sebesar Rp3,42 miliar, dan denda keterlambatan sebesar Rp76,62 juta pada pekerjaan.
5. Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 tidak optimal melaksanakan manajemen kas dalam pemanfaatan dana yang menganggur,
6. Terdapat asset lainnya sebesar Rp2,18 miliar yang merupakan ketekoran kas pada bendahara belanja tidak terduga dinas Kesehatan tahun anggaran 2022 (Siaran Pers BPK, 2023).

Ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi tahun 2023 menyatakan, laporan keuangan yang dihasilkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bertahan hingga saat ini. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat masalah terkait temuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan berupa:

1. Terdapat kelemahan dalam prosedur pengawasan dan pengendalian data penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), yang menjadi dasar perhitungan penggunaan pajak bagi para penyedia BBKB.

2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Dinas PUPR, serta sanksi keuangan yang belum diterapkan.
3. Utang belanja BLUD RSUD Raden Mattaher tidak dapat dilunasi pada tahun berjalan karena belum mendapatkan dukungan APBD yang memadai secara rasional, sehingga menyebabkan utang belanja terus meningkat. (Siaran Pers BPK, 2024)

BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 untuk mendorong Gubernur meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah. Selain itu, IHPD juga diharapkan dapat membantu DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, yang akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu (Yulia et al. 2022) menyatakan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama menurut (Rosiana Anjani et al., 2024) menyatakan bahwa SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, menurut (Lumuly et al., 2024) menyatakan bahwa implementasi sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Ambon.

Penelitian yang mengkaji tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut (Zubaidi et al., 2019) dan (Fakhri et al., 2021) kompetensi SDM berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan, menurut (Giri Laksono, 2023) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang mengkaji tentang Komitmen Organisasi menurut (Widari & Sutrisno, 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, menurut (Giri Laksono,

2023) komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang mengkaji tentang Pengendalian Internal menurut (Heinrich & Probohudono, 2023) dan (Widari & Sutrisno, 2017) menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut (Rosiana Anjani et al., 2024) SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. GAP Penelitian ini disusun berdasarkan variabel mana yang berpengaruh dan tidak berpengaruh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel dan objek penelitian yang mana penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Sukoharjo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah Sukoharjo berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan oleh sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi (R. Rahayu & Eko Triyanto, 2023). Penambahan variabel independen yaitu Pengendalian Internal dikarenakan terdapat permasalahan dalam pengendalian internal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta, terdapat perbedaan hasil penelitian yang mana penelitian yang dilakukan oleh (Pesireron & Siahaya, 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan menurut (PURA, 2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta perbedaan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dilakukan di Badan Keuangan Daerah Sukoharjo (R. Rahayu & Eko Triyanto, 2023), sedangkan peneliti dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Dengan adanya fenomena masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian**

Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi?
2. Apakah Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi?
5. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan referensi acuan peneliti lainnya terkait implementasi sistem informasi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pengendalian internal dalam mencapai laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

Sebagai saran atau masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dengan penerapan implementasi sistem informasi pemerintah daerah sebagai aplikasi untuk memudahkan penginputan data dan informasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia sebagai penunjang pengaplikasian, komitmen organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi, dan pengendalian internal sebagai landasan penerapan peraturan pemerintahan agar sesuai dengan aturan